

**MODEL PENGELOLAAN KONFLIK DI PASAR INPRES MANONDA PALU  
KECAMATAN PALU BARAT SULAWESI TENGAH**

**SITI HAJAR N. AEPU**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

**MODEL PENGELOLAAN KONFLIK DI PASAR INPRES MANONDA PALU  
KECAMATAN PALU BARAT SULAWESI TENGAH**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai gelar Magister**

**Program Studi  
Antropologi**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SITI HAJAR N. AEPU**

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

**TESIS**  
**MODEL PENGELOLAAN KONFLIK DI PASAR INPRES MANONDA PALU**  
**KECAMATAN PALU BARAT SULAWESI TENGAH**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SITI HAJAR N. AEPU**  
**Nomor Pokok P1900211403**

**Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Menyetujui**  
**Komisi Penasehat,**

**Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA**  
**Ketua**

**Dr. Muh. Basir Said, MA**  
**Anggota**

**Ketua Program Studi**  
**Antropologi**

**Direktur Program Pascasarjana**  
**Universitas Hasanuddin**

**Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA**

**Prof. Dr. Ir. Mursalim**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Hajar N. Aepu

Nomor Pokok : P1900211403

Program Studi : Antropologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2013

Yang menyatakan

Siti Hajar N. Aepu

## PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Antropologi pada Program Studi Antropologi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Dengan judul “ Model Pengelolaan Konflik di Pasar Inpres Manonda Palu kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah”.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA selaku ketua Komisi Pembimbing pertama dan Bapak Dr. Muh. Basir Said, MA selaku Komisi Pembimbing kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan dan saran-saran sehingga penulisan tesis ini dapat selesai sesuai harapan. Dan juga penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian tulisan ini olehnya di harapkan kepada semua pihak agar memberikan masukan, kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Mursalim (Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA (Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin) dan Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA (Ketua Program Studi Antropologi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin). Para dosen-dosenku semua yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis

dibangku kuliah semua itu sangat berarti bagi saya. Serta para pengelola dan staf administrasi terima kasih semuanya.

2. Prof. Dr. H. Pawennari Hijjang, MA, Prof. Dr. M. Yamin Sani, MS dan Dr. Syaifullah Cangara, M.Si. Selaku penguji terima kasih saran-saran dan masukan-masukannya.
3. Prof. Dr. Ir. Mohammad Basir, SE, MS selaku rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan izin belajar selama 2 tahun, membebaskan tugas-tugas pokok dan kepada DIKTI yang telah memberikan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011.
4. Kedua Orang Tuaku tersayang Ibunda Runisa B. Badira dan Ayahanda Nusi Aepu, yang telah memberikan dorongan dan doa serta rela menjaga dan merawat cucunda selama penulis di bangku kuliah, suami saya EDDY terima kasih selama ini telah banyak membantu, mendukung dan menyemangati penulis kalau lagi banyak masalah, anakku tersayang Muh. Farel Pratama terima kasih nak telah mengerti mama serta saudara-saudaraku : Kak Rukmin N. Aepu, A.MA, Kak Fatmawati N. Aepu, A.Ma.Pd, Kak Fadlun N. Aepu, Spd, Kak Gamar N. Aepu, Adik Farida N. Aepu, SP, terima kasih telah memberikan banyak motivasi serta ponakan-ponakanku semua terutama buat ponakanku Icha yang telah banyak membantu tantenya dalam hal menjaga anak Farel kalau ditinggal penelitian, terima kasih semuanya tanpa bantuan kalian semua tesis ini tidak dapat selesai.

5. Teman-temanku semua angkatan 2011 Ibu Dety, Ibu Nani, Risma, Ningsi, Pak Ahsan, Pak Iwan Sumantri, Robert, Aman, Hafez kebersamaan kita di bangku kuliah kan kukenang selamanya.
6. Semua informan yang telah memberikan data dan informasi, ketua adat etnis Kaili, Ketua KKSS, Kepala Pasar, informan kunci, terima kasih tanpa bantuan kalian semua penulisan tesis ini tidak akan terlaksana.

Saya tidak bisa membalas bantuan yang sudah diberikan oleh semua pihak dan semuanya kuserahkan kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan Rahmat kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menuntut ilmu sampai pada penelitian dan penyelesaian penulisan tesis ini Amin Yarabbal Alamin. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bidang ilmu antropologi.

Wasallam,

Makassar, Juli 2013

Siti Hajar N. Aepu.

## ABSTRAK

Siti Hajar N. Aepu. Model Pengelolaan Konflik Di Pasar Inpres Manonda Palu Kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah (dibimbing oleh H. Mahmud Tang dan Muh. Basir Said).

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya konflik di pasar inpres Manonda Palu, menganalisis model pengelolaan dan penyelesaian konflik serta menganalisis respon etnis Kaili dan etnis Bugis dalam penyelesaian konflik di pasar inpres Manonda Palu.

Penelitian ini dilakukan di pasar inpres Manonda Palu kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen serta data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di pasar inpres Manonda Palu ini disebabkan perebutan sumber daya, adanya kecemburuan sosial etnis Kaili terhadap etnis Bugis karena melihat keberhasilan dalam penguasaan pasar inpres Manonda ini, sementara etnis Kaili hanya sebagai pedagang tradisional otomatis hasil yang didapatkan jauh lebih kecil, dan juga adanya stereotipe-stereotipe diantara kedua etnis ini, dimana ruang-ruang ekonomi lebih didominasi oleh etnis Bugis olehnya etnis Kaili merasa terpinggirkan akibatnya terjadilah konflik antar etnis di Kota Palu ini. Terdapat 4 (empat) model pengelolaan konflik serta penyelesaian konflik yang dilakukan melalui musyawarah dipertemukan semua tokoh agama, tokoh adat kedua etnis, tokoh masyarakat, pemerintah, kepolisian mencari solusi yang tepat agar konflik selanjutnya tidak terjadi lagi sehingga melahirkan surat perjanjian yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua etnis yang berkonflik. Adapun respon kedua etnis dalam penanganan konflik sangat direspon positif oleh etnis Bugis maupun etnis Kaili dan menurutnya tidak adanya gunanya berkonflik karena hanya merugikan saja.

Kata Kunci : Konflik, model pengelolaan dan penyelesaiannya.

## ABSTRACT

**Siti Hajar N. Aepu.** Conflict Management Model In The Market District Presidential Manonda West Palu Central Sulawesi (supervised by Mahmud Tang and Muh. Basir Said).

This study aims to analyze the causes of conflict in the market place instruction Manonda Palu, analyze models of conflict management and resolution as well as analyze the response and Kaili ethnic Bugis ethnic conflict in the completion of the market in Palu Manonda instruction.

The research was conducted in the market district instruction Manonda west Palu Central Sulawesi. Data collection methods used were observation, interviews, and document research and qualitative data were analysed descriptively.

The results showed that the conflict in the instruction Manonda Palu market is competition over resources, ethnic social natives and instruction Manonda dominate this market, while ethnic Kaili just as traditional merchants automatic results obtained far behind, and also the stereotypes between the two ethnic groups, which is more economic spaces dominated by Bugis ethnic Kaili feel marginalized by it to pass as a result of ethnic conflict in the city of Palu. Model management and conflict resolution that is done is through deliberation in unite all religious leaders, traditional leaders two ethnic groups, community leaders, government, police looking for the right solution that does not happen again next conflict that gave birth to a letter agreement signed and agreed upon by both ethnic conflict.

Keywords : Conflict management and resolution models.

## DAFTAR ISI

	halaman
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
2. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Konsep dan Teori Konflik	13
C. Model Pengelolaan Konflik	21
D. Penyelesaian Konflik (Resolusi Konflik)	25
E. Kerangka Pikir	27
3. METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	29
D. Jenis Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	32
4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Kondisi Pasar	33
B. PT. Sari Dewi Membangun Sebagai Pengelola Pasar	39
C. Etnis Bugis Sebagai Pedagang Di Pasar Inpres Manonda	44
D. Etnis Kaili Sebagai Pedagang Tradisional	56

5.	HASIL DAN PEMBAHASAN	64
	A. Penyebab Konflik	64
	B. Konsekuensi Konflik	80
	C. Model Pengelolaan Konflik dan Penyelesaian Konflik	82
	D. Respon Etnis Bugis dan Etnis Kaili Terhadap Penyelesaian Konflik	96
6.	KESIMPULAN DAN SARAN	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	102
	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN	113

## DAFTAR TABEL

<b>nomor</b>		<b>halaman</b>
1.	Jumlah Pedagang di Pasar Inpres Manonda Palu	36
2.	Struktur Organisasi Pengurus Pasar Inpres Manonda Palu	39
3.	Daftar Informan	116

## DAFTAR GAMBAR

<b>nomor</b>		<b>halaman</b>
1.	Kerangka Pemikiran	28
2.	Peta Kelurahan Kamonji	117

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara administratif kota Palu adalah Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari 4 (empat ) kecamatan dan 43 kelurahan dengan luas wilayah 395,06 km<sup>2</sup>. Terletak dikawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Berdasarkan hasil proyeksi SUPAS penduduk kota Palu dari tahun 2012 mencapai 372.336 jiwa. Pertambahan penduduk setiap tahun telah menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk, tingkat kepadatan penduduk tahun 2012 mencapai 793 jiwa/km<sup>2</sup>. (BPS Palu).

Dari data yang dipaparkan di atas, kepadatan penduduk di kota Palu dari tahun ketahun meningkat, banyaknya pengangguran dimana-mana dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga semua itu dapat memicu terjadinya konflik dan kekerasan di kota Palu. Akhir-akhir ini kota Palu rawan konflik walaupun permasalahan sebenarnya hanya sepele seperti akibat tawuran anak-anak remaja, minum-minuman keras, judi, perebutan tapal batas desa/kelurahan, perebutan sumber daya alam di pasar-pasar, akibat gengsi, serta masih banyak lagi permasalahannya sehingga warga atau masyarakat kota Palu cepat terprovokasi akibatnya menimbulkan konflik yang tak terelakan. Tetapi apabila setiap kelompok mampu menahan sifat-sifat mayoritas/minoritas dan memegang teguh semboyan “Bhineka Tunggal Ika” maka yakin dan

percaya konflik yang sifatnya negatif tidak akan terjadi, sehingga kondisi lingkungan sosial dapat aman sejahtera dan harmonis.

Masyarakat kota Palu juga mengalami konflik antar etnis, selain etnis Kaili sebagai penduduk asli daerah, juga terdapat etnis Jawa, Madura, Cina, etnis Bugis, Makassar, Gorontalo, Manado, Padang dan lain-lain. Paling besar adalah Etnis Bugis yang datang dari Sulawesi Selatan dan menjadikan Kota Palu sebagai sentral kegiatan ekonomi. Etnis Bugis pertama kali datang di kota Palu pada tahun 1950, hanya sekedar menjajaki apakah ada peluang untuk membuka usaha (berjualan). Dengan seiring berjalannya waktu akhirnya etnis Bugis dapat menguasai pasar-pasar di Kota Palu, kemudian mulai memboyong keluarganya untuk tinggal di kota Palu. Awalnya kedatangan etnis Bugis di kota Palu mendapat sambutan baik oleh etnis Kaili sebagai penduduk asli setempat.

Namun lama kelamaan melihat etnis Bugis sudah mulai berhasil karena keuletan, kegigihan dan etos kerja mereka yang pekerja keras sehingga lebih menguasai pasar-pasar yang ada di kota Palu khususnya pasar inpres Manonda kecamatan Palu Barat ini. Dengan keberhasilan mereka menyebabkan etnis Kaili merasa kalah dalam hal persaingan mengakses sumber daya ekonomi di pasar-pasar yang ada di kota Palu khususnya pasar inpres Manonda Palu, dimana etnis Kaili hanya sebagai pedagang tradisional dalam sebutannya pedagang INA-INA. Maka dari itulah etnis Kaili sudah merasa terpinggirkan akibat dengan adanya penguasaan ruang-ruang ekonomi oleh etnis Bugis.

Dengan ketidaksenangan etnis Kaili tersebut berujung pada pembakaran pasar inpres Manonda pada tahun 1992 pertama kalinya pasar inpres Manonda

terbakar yang menghancurkan ruko, los dan toko-toko yang ada dalam pasar inpres Manonda tersebut, kemudian pada juni 2004 kembali pasar inpres Manonda tersebut terbakar, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini hanya kerugian mencapai puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Maka dari itulah keharmonisan antara etnis Kaili dan etnis Bugis sudah mulai menunjukkan ketegangan. Namun sekarang ini sudah bisa berjalan beriringan walaupun sebenarnya perbedaan itu sangat menonjol ketika kita masuk di area pasar inpres Manonda Palu dan masih ada ketidak senangan etnis Kaili terhadap etnis Bugis yang lebih menguasai pasar inpres Manonda tersebut.

Studi-studi tentang konflik yang terjadi di kota Palu sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti tetapi yang mengkaji konflik khusus di pasar inpres Manonda Palu kecamatan Palu Barat ini belum ada sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang konflik yang terjadi di pasar inpres Manonda Palu dalam kajian model pengelolaan konflik, alasan lain dalam pemilihan lokasi penelitian karena pasar inpres Manonda ini adalah pasar terbesar dan terpadat di kota Palu serta yang paling banyak di dominasi oleh pedagang etnis Bugis otomatis potensi konflik sangat besar terjadi di pasar inpres Manonda tersebut. Namanya saja ruang ekonomi yang tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga banyak terjadi gesekan-gesekan yang mengarah pada terjadinya konflik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nukma “Konflik Dalam Relasi Sosial (Studi Kasus Migran Suku Bugis Dengan Suku Kaili Di Kelurahan Tatura Utara Kec. Palu Selatan Sulawesi Tengah)”, dalam penelitiannya menemukan adanya

perbedaan yang menonjol dalam etos kerja dimana suku Bugis yang umumnya bekerja di sektor perdagangan dikenal sebagai pekerja ulet, disiplin dan tekun, dan keberhasilan suku Bugis dalam perantauan karena memiliki motivasi kerja serta tekad yang kuat untuk meraih hasil yang diinginkan. Berbeda dengan suku Kaili hanya memilih sebagai pedagang tradisional akibatnya secara ekonomi mereka jauh tertinggal dari suku Bugis.

Selanjutnya penelitian-penelitian di pasar inpres Manonda ini sudah banyak juga dilakukan oleh beberapa peneliti, namun dalam kajian yang berbeda-beda seperti penelitian yang dilakukan oleh Rismawati tentang “Pertukaran Yang Mengikat Dalam Hubungan Kerjasama Di Kalangan INA-INA”. Dalam temuannya adalah yang menempati kios pemerintah, kios swasta umumnya pedagang pendatang yakni etnis Bugis dibanding dengan etnis lokal, sehingga pedagang INA-INA sering mengalami kesulitan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada waktu hujan, mereka harus masuk dan menempati kios pemerintah, kios swasta atau pedagang pendatang. Hal ini memunculkan perilaku atau sikap yang kurang bersahabat sehingga seringkali menimbulkan konflik yang berujung pada pembakaran pasar inpres Manonda ini. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hakim tentang “Dominasi Pedagang Etnis Bugis” dalam kajiannya menemukan dengan didominasinya pasar inpres Manonda oleh etnis Bugis sehingga konflik antara kedua etnis ini terjadi karena etnis Kaili tidak bisa menerima kenyataan bahwa pasar inpres lebih didominasi oleh etnis Bugis.

Dari apa yang diuraikan di atas bahwa penelitian-penelitian tentang konflik sudah banyak dilakukan tetapi dengan bentuk kajian yang berbeda, maka dari

itu penelitian ini perlu dilakukan dan lebih difokuskan pada kajian model pengelolaan konflik yang terjadi di pasar inpres Manonda Palu kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab terjadinya konflik di pasar inpres Manonda Palu kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah ?
2. Bagaimana model pengelolaan dan cara penyelesaian konflik di pasar inpres Manonda Palu kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah ?
3. Bagaimana respon etnis Bugis dan etnis Kaili terhadap penyelesaian konflik di pasar inpres Manonda Palu Kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik di pasar inpres Manonda palu Kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah.
2. Untuk menganalisis model pengelolaan dan penyelesaian konflik di pasar inpres Manonda Palu Kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah.

3. Untuk menganalisis respon etnis Bugis dan etnis Kaili terhadap penyelesaian konflik di pasar inpres Manonda Palu Kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian yang telah di kemukakan di atas, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tinjauan bagi peneliti selanjutnya dalam hal mengkaji model pengelolaan konflik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan kontribusi bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam hal pengelolaan dan penyelesaian konflik di kota Palu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

Studi tentang konflik sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu olehnya penulis mencoba menguraikan hasil-hasil penelitian tentang konflik yang terjadi apa yang menjadi sumber konflik dan bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Arkanudin dengan judul “Menelusuri Akar Konflik Antar Etnik Khususnya Etnik Dayak dan Madura Di Kalimantan Barat”. Dalam penelitiannya menemukan bahwa akar terjadinya konflik antar etnik Dayak dan Madura di Kalimantan Barat berawal dari adanya perbedaan sosial budaya yang melahirkan perbedaan pemahaman, sikap, dan perilaku yang dapat memunculkan pandangan negatif, kebencian dan antipati sehingga peristiwa yang semula sepele yang hanya dilakukan oleh individu menjadi penyulut meledaknya konflik yang melibatkan etnik. Kemudian dijelaskan pula bahwa perbedaan etnik tidak akan menjadi masalah selama perbedaan itu tidak diikuti dengan perbedaan yang tajam dalam sistem nilai dan orientasi nilai budaya (<http://Arkan.blogspot.com/2012/04/menelusuri-akar-konflik-antar-etnik.html>), di akses 24 September 2012.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Mamar dkk (dalam Mapanggara : 2001) yang berjudul “Respon Militer Terhadap Konflik Sosial Di Poso”, dalam penelitiannya menemukan bahwa embrio konflik kepentingan politik dimulai pada periode Bupati Arif Patangga. Menjelang berakhirnya masa jabatan keduanya, kelompok Kristen sudah melakukan konsiliasi pada tingkat

massa dan elite politik. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa yang akan menjadi Bupati Poso pada periode berikutnya adalah Sekwilda Poso ketika itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, tampak bahwa spektrum kepentingan politik semakin beragam, yaitu terciptanya nuansa etnis dan agama. Hal ini semakin tampak setelah dilakukannya pemilihan Bupati pada tahun 1999. Nuansa etnis masuk dalam konflik tataran konflik kepentingan antargolongan agama yang berbeda karena “sharing of power” tidak terjadi pada jabatan strategis, yaitu Bupati, Wakil Bupati, dan ketua Bappeda dipegang orang-orang yang beragama islam, sedangkan kelompok kristiani hanya mendominasi pada jabatan kepala-kepala dinas.

Selanjutnya ditemukan bahwa, selain kepentingan politik lokal dan regional, kecemburuan sosial dan ekonomi serta lemahnya supresi hukum merupakan akar permasalahan konflik sosial III di tanah Sintuwu Maroso. Hampir 80% etnis pendatang (Bugis, Jawa, Gorontalo) yang mayoritas beragama islam, mendominasi sumber perekonomian strategis seperti pasar, pertokoan, pertanian, dan perkebunan. Sebaliknya etnis lokal seperti Pamona dan Mori termarginalisasi dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Akibatnya, terlihat bahwa dalam kerusuhan sosial III, etnis pendatang menjadi sasaran pembantaian secara massal dan pembakaran rumah serta penjarahan harta benda.

Bertolak dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa akar permasalahan terjadinya konflik sosial di kabupaten Poso adalah merupakan akumulasi dari aspek politik, ekonomi, hukum, etnis dan agama. Dari beberapa aspek itu yang

tampak menjadi akar utama permasalahan terjadinya konflik sosial adalah aspek etnis dan agama. Namun, kedua aspek itu pada dasarnya hanya merupakan kendaraan politik bagi kepentingan elite tertentu. Dapat saja dikatakan aspek politik dan agama merupakan sinergi yang menjadi akar utama terjadinya konflik sosial di Poso. Sedangkan aspek-aspek lainnya hanya merupakan faktor penunjangnya.

Dari kajian tentang konflik yang diutarakan di atas menunjukan sumber konflik yang berbeda-beda, tetapi biasanya ketika konflik sudah memuncak hanya karena persoalan sepele sudah mengaitkan berbagai permasalahan, baik dari segi ekonomi, politik, budaya dll, sehingga memunculkan konflik yang besar seperti halnya dalam penelitian yang peneliti lakukan di pasar inpres Manonda Palu ini adalah hanya persoalan perebutan sumber daya alam, didominasinya pasar inpres Manonda oleh etnis Bugis, adanya stereotipe dan kecemburuan sosial sehingga menimbulkan konflik yang besar antara kedua etnis ini. Dan juga hanya dipicu dari meja judi oleh sekelompok orang maka sampai memuncak pada konflik antar etnis yang terjadi di pasar inpres Manonda Palu kecamatan Palu Barat kota Palu.

Selanjutnya dalam (<http://www.halmaherautara.com/peran-adat-bagi-rekonsiliasi-halmahera-utara.html>), “Peran Adat Bagi Rekonsiliasi Halmahera Utara”, menunjukan konflik horizontal bernuansa SARA yang melanda Halmahera dan sekitarnya tahun 1999-2000 merupakan pelajaran yang tak terlupakan bagi seluruh komponen masyarakat di daerah ini. Di Halmahera Utara sendiri konflik tersebut menjadi noda hitam dalam sejarah kehidupan masyarakat

adat yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Dari konflik yang terjadi di Maluku Utara, kawasan Halmahera Utara merupakan salah satu wilayah yang paling banyak menelan korban jiwa.

Di Halmahera Utara khususnya wilayah Tobelo yang justru merupakan tempat dimana perbedaan suku-suku setempat bermula dan berada di bawah payung adat “Hibualamo” sebagai komunitas masyarakat adat yang sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dengan slogan “Ngone Oria Dodoto” yang berarti kita semua bersaudara, justru menjadi rawan konflik. Konflik yang terjadi seakan menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dalam masyarakat adat Hibualamo sudah tidak relevan lagi dalam konteks saat itu sehingga menimbulkan kesan bahwa nilai-nilai budaya telah hancur tergilas oleh perubahan zaman. Akan tetapi penyelesaian konflik yang relatif singkat jika dibandingkan dengan konflik serupa di Maluku (Ambon) adalah hal yang menarik yang patut dicermati.

Hal tersebut tidak luput dari peran lembaga adat sebagai wadah pemersatu dalam mengupayakan rekonsiliasi antar kedua belah pihak yang bertikai. Proses penyelesaian konflik di Halmahera Utara dapat terwujud melalui keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh-tokoh adat yang sama-sama menyadari bahwa mereka hanyalah korban kepentingan politik kelompok tertentu yang memanfaatkan isu-isu agama yang sedang marak saat itu. salah satu upaya yang dilakukan dalam proses rekonsiliasi adalah dengan melihat kembali nilai-nilai adat Hibualamo. Hal ini terbukti memberikan kontribusi besar bagi terwujudnya rekonsiliasi diantara kedua pihak yang bertikai. Dalam waktu yang relatif singkat para pengungsi dari beberapa wilayah sudah bisa kembali ke

kampung halamannya tanpa harus menunggu program pemulangan pengunjung dari pemerintah.

Positifnya, identitas adat masyarakat Hibualamo kembali mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat Halmahera Utara. “Ngone Oria Dodoto” yang berarti kita semua bersaudara kembali ditempatkan sebagai lambang kerukunan dan persatuan masyarakat. Berkaca dari konflik Halmahera Utara ada dua hal yang dapat dipelajari yakni pertama, ketika konflik terjadi, masing-masing pihak yang bertikai tidak lagi berada dalam posisinya sebagai masyarakat adat dengan identitas budaya yang sama namun agama yang menjadi pembeda. Kedua, konflik ini menjadikan identitas kesatuan masyarakat adat di Halmahera Utara semakin mendapat perhatian dari semua pihak yang menginginkan rekonsiliasi dan menjadi semakin kuat pengaruhnya dalam masyarakat.

Dengan melihat penyelesaian konflik berdasarkan peran adat Hibualamo di Halmahera Utara yang telah diuraikan di atas, dapat dikaitkan dalam penelitian konflik di pasar inpres Manonda Palu kecamatan Palu Barat ini. Dalam penyelesaian konflik masih melalui musyawarah dengan melibatkan pemerintah dan komponen-komponennya, sehingga melahirkan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak yang bertikai. Namun, secara adat kota Palu juga mempunyai konsep “Polibu Ntodea Nosarara Nosabatutu” yang dijadikan model kearifan lokal untuk menangani berbagai permasalahan yang terjadi di kota Palu. Polibu Ntodea Nosarara Nosabatutu merupakan konsep kearifan lokal di tanah Kaili Sulawesi Tengah (kota Palu) yang menjadi salah satu modal leluhur dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kegiatan Polibu Ntodea Nosarara

Nosabatutu sebagai suatu budaya Kaili yang dapat mengantisipasi ancaman konflik dalam masyarakat, karena kegiatan tersebut diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan untuk membicarakan setiap masalah yang dihadapi dalam masyarakat.

Penyebab terjadinya konflik antara lain adanya pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah dan tidak pernah diselesaikan melalui musyawarah yang disebut “Polibu Ntodea Nosarara Nosabatutu”, sehingga perbedaan pandangan yang ada semakin lama semakin memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan adanya forum Polibu Ntodea Nosarara Nosabatutu terbentuk dalam setiap kelompok masyarakat. Arti Polibu Ntodea Nosarara Nosabatutu dapat diartikan sebagai masyarakat yang duduk bersama bermusyawarah, sedangkan Nosarara Nosabatutu adalah bersaudara dan bersatu jadi dapat dikatakan “Polibu Ntodea Nosarara Nosabatutu” adalah masyarakat duduk bersama dalam bermusyawarah untuk memecahkan setiap masalah yang terjadi untuk menyatukan pikiran, pandangan yang bersaudara dan bersatu maka yakin konflik yang mengarah pada kekerasan tidak terjadi. Dalam penyelesaian konflik yang terjadi di kota Palu saat ini sangat layak kalau dikembalikan kepada kearifan lokal budaya Polibu Ntodea Nosarara Nosabatutu karena didalamnya memuat semua nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat yang cukup ampuh dalam penyelesaian konflik. Kearifan lokal inilah yang kadang-kadang pemerintah lupakan, dan hanya dijadikan sebagai slogan atau semboyan tetapi tidak difungsikan untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di kota Palu saat ini. Dengan kearifan lokal yang sudah lama tidak

difungsikan menurut ketua adat kota Palu perlu digagas lagi guna mengantisipasi konflik yang marak terjadi di kota Palu saat ini.

Selanjutnya dalam makalahnya, Mamar mengatakan selain persoalan sejarah, kebudayaan dan kemasyarakatan tingkat lokal di Provinsi Sulawesi Tengah yang menimbulkan konflik dan korban jiwa pada masyarakat Sulawesi Tengah, dimana kasus-kasus konflik di kota Palu dan kabupaten Donggala adalah dalam bentuk perkelahian antar sekolah, persaingan mengakses sumber daya alam di pasar, tindakan aparat keamanan yang bersifat arogan, perkelahian pemuda antar desa, persoalan mabuk karena minuman keras dan judi serta berbagai macam persoalan sosial budaya lainnya. Semua itu menjadi pemicu konflik akhir-akhir ini yang marak terjadi di kota Palu dan sekitarnya.

## **B. Konsep dan Teori Konflik.**

Konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Dalam bentuknya yang ekstrim, konflik itu dilangsungkan tidak hanya mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya (Suyanto & Narwoko 2011 : 68).

Dalam kehidupan sosial manusia, dimana saja dan kapan saja tidak pernah lepas dari apa yang disebut “konflik”. Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial benturan kepentingan, keinginan, pendapat dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih (Chang dalam Mulyadi 2002), mempertanyakan

benarkah “konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang dan masalah keuangan?, ternyata jawabannya “tidak”, dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial (dalam artikel jurnal humaniora volume XIV. No. 3/2002).

Masyarakat dan konflik merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bersifat alamiah. Menurut Alo Liliweri (dalam <http://prof-arkan.blogspot.com>. di akses 24 September 2012), bahwa konflik itu normal dan tidak dapat dielakan sepanjang ada interaksi dan kerjasama antar manusia. Konflik mempunyai berbagai bentuk misalnya konflik antar pribadi, antar kelompok, konflik antar organisasi dan lain sebagainya. Konflik pada dasarnya memiliki beberapa unsur yaitu ada dua pihak yang terlibat, ada tujuan yang dijadikan sasaran, ada tindakan dan situasi yang melahirkan sebuah pertentangan.

Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif, merugikan dan mengganggu kestabilan. Tetapi pada dasarnya konflik mempunyai sisi lain yang berdaya positif yaitu sebagai sebuah proses menuju perubahan. Sehingga konflik harus diakui keberadaannya, diolah, dimanajemen, dan diubah menjadi kekuatan untuk menuju perubahan yang baik. Tidak satu masyarakat pun yang tidak mengalami konflik antar anggotanya ataupun dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawah individu dalam suatu interaksi, perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah

menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat dan lain sebagainya. Dengan dibawah serta ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat.

Didalam realitas masyarakat, konflik sebagai hal yang harus ada dan kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adanya perbedaan kekuasaan dapat dipastikan menjadi sumber konflik dalam sebuah sistem sosial terutama masyarakat yang kompleks dan heterogen. Tidak hanya itu, sumber daya yang langka (terutama sumber daya ekonomi) didalam masyarakat akan membangkitkan kompetisi diantara pelaku ekonomi yang memperebutkannya dan bukan mustahil berujung pada pertikaian akibat persoalan distribusi sumber daya tersebut tidak merata. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bersaing. Kondisi semacam ini, dalam banyak kasus kerap menyebabkan terjadinya konflik (Wirawan, 2012 : 59).

Kemudian berkenaan dengan konflik sosial, Simmel mengembangkan tiga perangkat proposisi tentang intensitas politik, fungsi konflik bagi pihak yang terlibat, dan fungsi konflik bagi sistem keseluruhan. Dalam perangkat proposisi tentang intensitas konflik, Simmel mengemukakan bahwa semakin tinggi derajat keterlibatan emosional pihak yang terlibat dalam suatu konflik, maka semakin kuat kecenderungan untuk mengarah pada kekerasan (Reeve, 2009 : 28-29).

Pembedaan antara berbagai bentuk konflik menjadi pembahasan pula dalam teori konflik Lewis Coser. Namun Coser membedakan dua tipe dasar konflik yaitu konflik realistik dan non realistik. Konflik realistik adalah memiliki

sumber yang konkret atau bersifat materil, seperti perebutan sumber ekonomi atau wilayah. Jika mereka telah memperoleh sumber rebutan itu, dan bila di dapat diperoleh tanpa perkelahian, maka konflik akan segera diatasi dengan baik. Konflik nonrealistis didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, konflik ini seperti konflik antar agama, antar etnis, dan konflik antar kepercayaan lainnya. Konflik adalah tujuan itu sendiri, baik diizinkan atau tidak. Konflik nonrealistis merupakan satu cara menurunkan ketegangan atau mempertegas identitas satu kelompok dan cara ini mewujudkan bentuk-bentuk kekejian yang sesungguhnya turun dari sumber-sumber lain. Antara konflik yang pertama dan kedua, konflik yang nonrealistislah cenderung yang sulit untuk menemukan resolusi konflik, konsensus, dan perdamaian tidak akan mudah diperoleh. Bagi Coser sangat memungkinkan bahwa konflik melahirkan kedua tipe sekaligus sehingga menghasilkan situasi konflik yang lebih kompleks (Coser, dalam Susan, 2010 : 60-61).

Selanjutnya dalam teori struktural konflik yaitu ada beragam ketidaksetaraan di masyarakat. Kelompok etnis mungkin tidak setara, muda dan tua mungkin tidak setara, laki-laki dan perempuan mungkin tidak setara, orang-orang yang berbeda agama bisa tidak setara dan seterusnya. Kemudahan yang tidak setara yang melekat pada kelompok tersebut juga bermacam-macam. Berbagai kelompok bisa memiliki kekuasaan, wewenang, prestise, kekayaan atau kombinasi unsur-unsur tersebut dengan kemudahan lainnya (Jones, 2010 : 15).

Seperti yang dikatakan oleh Wes Sharrock (dalam Jones, 2010 : 15-16) yaitu : “pandangan konflik dibangun atas dasar asumsi bahwa setiap masyarakat dapat memberikan kehidupan baik luar biasa bagi sebagian orang tetapi hal ini biasanya hanya mungkin karena kebanyakan orang tertindas dan tertekan. Oleh sebab itu, perbedaan kepentingan dalam masyarakat sama pentingnya dengan kesepakatan atas aturan dan nilai-nilai, dan sebagian besar masyarakat diorganisasi sedemikian sehingga masyarakat tersebut tidak hanya memberikan manfaat lebih besar dari sebagian warga berarti ketidaknyamanan bagi sebagian warga lain yang tidak mendapatkan kemudahan”.

Kemudian Max Weber memandang bahwa pertentangan merupakan masalah prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tak dapat di hilangkan dalam susunan masyarakat apapun pada masalah yang akan datang, orang-orang akan tetap selalu bertarung dan memperebutkan berbagai sumber daya alam, walaupun mengambil bentuk dan tingkat kekuasaan secara substansial sangat bervariasi. Selanjutnya Ralf Dahrendof melihat konflik itu muncul karena adanya superordinat dan subordinat yang berkonflik dan kemudian terjadi perubahan sosial. Menurutnya bahwa setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Fungsionalisme mengatakan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas sedangkan teoritis konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan (Goodman, 2011 : 153).

Para antropolog mengenal dua model konflik. Pertama, model konflik yang non-marxian yaitu model konflik ini memiliki ciri-ciri yang berkebalikan dari asumsi-asumsi mengenai model ekuilibrium. Konflik ini dilihat sebagai gejala yang normal dan dihasilkan secara internal. Malahan dalam model ini konflik dianggap menyumbang bagi terpeliharanya sistem sosial. Kecenderungan logis dalam model ini adalah menggunakan satu satuan analisis apakah itu suatu masyarakat pada tingkat makro atau peranan pada tingkat mikro. Analisis konflik mengambil keuntungan dari model ini sebagai konsep dasar. Mereka memandang dunia sosial sebagai dikotomi dan terbentuk oleh oposisi ketimbang penyatuan oleh nilai-nilai bersama. Dengan kata lain, mereka memusatkan perhatian secara logis sekurang-kurangnya pada dua satuan yang mengekspresikan kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Kedua konflik Marxian, dalam model konflik ini, konflik sekali lagi dilihat sebagai gejala yang normal dan esensial. Perubahan adalah ihwal yang normal dan secara internal dihasilkan dan penekanannya pada kelompok-kelompok kepentingan yang berkonflik ketimbang sistem nilai sentral. Konflik Marxian menuju kepada perubahan, dan bahkan perubahan secara revolusioner, ketimbang mempertahankan sistem. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh posisi sentral dan kontradiksi dalam kerangka Marxian. Kontradiksi ada dalam sistem yang menghasilkan suatu tipe perubahan yang disebut dialektika, seperti pekerja untuk mendapat upah versus pemilik sarana produksi dan kapitalisme (Saifuddin, 2006 : 173-175).

Kemudian Johan Galtung mengatakan selama ini konflik selalu diidentikan dengan kekerasan, menurutnya konflik dapat diartikan sebagai benturan fisik dan verbal dimana akan muncul penghancuran, tapi konflik juga bisa dipahami sebagai sekumpulan permasalahan yang menghasilkan penciptaan penyelesaian baru sedangkan kekerasan adalah situasi ketidaknyamanan yang dialami aktor dimana ketidaknyamanan adalah apa yang “seharusnya” tidak sama dengan apa yang “ada” bisa juga berupa suatu sikap yang ditunjukkan untuk menekan pihak lawan, baik secara fisik, verbal ataupun psikologi (Galtung : 1960) (<http://blogspot.com/2010/10/teori-konflik-dan-evolusinya.html> ), diakses 29 februari 2013. Menurut Galtung keduanya kadang muncul sendiri-sendiri terkadang bisa juga bersamaan, dimana suatu konflik dapat berupa atau berujung dengan kekerasan dan kekerasan sendiri dapat memunculkan konflik.

Konflik Galtung memperlihatkan berbagai individu, kelompok dan organisasi membawa angka kepentingannya masing-masing. Kepentingan bisa berwujud dalam bentuk ekonomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan ekonomis dalam satu lingkungan yang sama, misalnya dua kelompok pedagang di pasar, masing-masing akan menciptakan persepsi terhadap kepentingan kelompok di luarnya. Proses ini akan membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan.

Segitiga konflik Galtung merupakan analisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan terciptanya konflik sosial. Ada tiga dimensi dalam segitiga konflik Galtung yaitu sikap, perilaku, dan kontradiksi. Sikap adalah

persepsi anggota etnis tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. perilaku dapat berupa kerjasama, persaingan atau paksaan, suatu gerakan dan tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem sikap dan perilaku sebagai suatu proses, artinya kontradiksi diciptakan oleh unsur persepsi dan gerak etnis-etnis yang hidup dalam lingkungan sosial. Secara sederhana sikap melahirkan perilaku, dan pada gilirannya melahirkan kontradiksi atau situasi. Sebaliknya, situasi bisa melahirkan sikap dan perilaku menurut Galtung (dalam Susan 2010 : 90-91).

Misalnya persepsi etnis A terhadap etnis B adalah negatif, maka muncul perilaku etnis A yang tidak kooperatif terhadap etnis B, sehingga menimbulkan situasi yang kurang baik atau kontradiksi. Sebaliknya, sikap atau etnis A akan dibalas dengan sikap dan perilaku etnis B dalam konteks antagonistic (melawan).

Dari apa yang dikemukakan oleh Galtung di atas, dapat terlihat pada pedagang yang ada di pasar inpres Manonda Palu, dimana etnis Kaili mempunyai persepsi terhadap etnis Bugis. Pedagang etnis Kaili menganggap etnis Bugis merebut semua ruang-ruang ekonomi yang ada di kota Palu, tempat-tempat perdagangan sehingga apapun yang dilakukan oleh orang Bugis sangat tidak diterima oleh orang Kaili. Seperti halnya di pasar inpres Manonda Palu lebih di kuasai oleh pedagang etnis Bugis dibanding etnis lokal yakni etnis Kaili, sehingga etnis Kaili merasa tersingkirkan, dalam hal pendapatan mereka kalah jauh daripada etnis Bugis. Sehingga sikap etnis Kaili tersebut di sambut oleh

etnis Bugis dengan melakukan perlawaan akhirnya konflik pun terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa etnis Bugis mempunyai kegigihan dalam hal perdagangan sehingga posisi mereka lebih jauh melambung tinggi dibandingkan dengan etnis Kaili yang hanya sebagai pedagang tradisional.

### **C. Model Pengelolaan Konflik.**

Salah satu kajian penting untuk menciptakan perdamaian, baik positif dan negatif adalah pengelolaan konflik (conflict management). Dalam kajian konflik dan perdamaian kontemporer conflict management bertujuan mencegah konflik menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan, baik langsung dan struktural. Rubenstein menyatakan bahwa “conflict management bertujuan me-moderation atau memberadabkan efek-efek konflik tanpa perlu menangani akar konflik dan sebab-sebabnya” Rubenstein (dalam Susan, 2009 : 136-137).

Teori conflict management menjelaskan bahwa semua konflik tidak perlu diselesaikan tetapi mempelajari bagaimana mengelola berbagai konflik dapat mengurangi eskalasi konflik kekerasan. Seperti pendapat Carpenter dan Kennedy (dalam Susan, 2009 : 136) yang menyatakan bahwa tantangan pada manajer konflik adalah bukan menghapus konflik melainkan mengatasi perbedaan seproduktif mungkin. Secara mendasar baik Rubenstein dan Carpenter telah menyatakan secara eksplisit bahwa istilah conflict management adalah upaya pencegahan konflik dari kekerasan tanpa harus mencapai pemecahan masalah.

Otomar J. Bartor dan Paul Wehr (dalam Susan, 2009 : 137 ) berpendapat bahwa conflict management adalah masalah bagaimana menjadi orang yang ahli (a skilled conflict actor). Kemudian melihat pada aspek perilaku konflik (conflict behavior) untuk meningkatkan keahlian pengelolaan konflik. Mereka mengkategorikan perilaku konflik kedalam dua posisi berlawanan, yaitu nonkoersif dan perilaku koersif. Perilaku nonkoersif termasuk di dalamnya adalah kerjasama murni, menjanjikan hadiah, dan persuasi. Sedangkan perilaku koersif adalah ancaman koersif, non kekerasan, dan kekerasan koersif. Hal ini memperjelas mengenai definisi terbatas dari conflict management sebagai praktik strategi konflik yang setiap pihak berkonflik harus ahli dalam berkonflik. Conflict managemen adalah proses setiap pihak, termasuk pihak ketiga, untuk menggunakan keahlian dan pengetahuan mereka untuk menciptakan strategi konflik yang tepat. Carpenter & Kennedy (dalam Susan, 2009 : 136-137).

Tata kelola konflik bisa di terjemahkan sebagai conflict management. Conflict managemen secara definitif adalah usaha mereduksi dan menekan (containment) kekerasan selama proses konflik melalui pelaksanaan wewenang dan kekuasaan (power), sehingga konflik bersifat produktif, dalam pengertiannya tercapai suatu resolusi yang memenangkan semua pihak yang berkonflik.

Menurut Moore, (dalam Susan, 2009 : 177-178) ada beberapa bentuk dan proses pengelolaan konflik sebagai berikut :

1. Avoidance : pihak-pihak berkonflik saling menghindari dan mengharap konflik bisa terselesaikan dengan sendirinya.

2. Informal problem solving : pihak-pihak berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal.
3. Negotiation : ketika konflik masih terus berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu melakukan negosiasi. Artinya mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil dari negosiasi bersifat prosedural yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam negosiasi.
4. Mediation : munculnya pihak ketiga yang diterima kedua pihak karena dipandang bisa membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai.
5. Executive dispute resolution approach : kemunculan pihak lain yang memberi suatu bentuk penyelesaian konflik.
6. Arbitration : suatu proses tanpa paksaan dari para pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau imprasioal.
7. Judicial approach : terjadinya intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberi kepastian hukum.
8. Legislative approach : intervensi melalui musyawarah politik dari lembaga perwakilan rakyat, kasus-kasus konflik kebijakan sering menggunakan pendekatan ini.
9. Extra legal approach : penanganan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal dan mungkin tidak dimiliki oleh pihak lawan. Salah satu pihak bisa memanfaatkan kekuatannya untuk menciptakan nonviolent action dan violence.

Pengelolaan konflik Moore tidak mesti selalu berjalan sebagai proses bertahap. Hal ini tergantung pada konteks dan jenis konflik. Olehnya dikaitkan dengan model pengelolaan konflik di pasar inpres Manonda kota Palu hanya terdapat 4 (empat) model pengelolaan konflik. serta perlu melakukan pengelolaan konflik guna mengurangi eskalasi konflik sehingga konflik yang sudah terjadi tidak berulang lagi, dan juga pengelolaan konflik bukan saja dilakukan ketika konflik sudah terjadi tetapi sebelum terjadi konflik sudah dilakukan pengeloaan konflik.

Tulisan Timo (dalam critical review Hendriko Firman di <http://boeangsaonet.wordpress.com>) menjelaskan dalam peleraian dan pecegahan konflik, konflik tidak akan dapat dicegah atau di lerai bila pihak-pihak yang bersangkutan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi potensi konflik atau konflik yang terjadi. Namun pencegahan konflik dapat di dukung atas 3 pendekatan pendukung yaitu : 1). Pengelolaan konflik. 2). Penyelesaian konflik. 3). Transformasi konflik.

Dari apa yang dipaparkan di atas erat kaitannya dengan pengelolaan konflik etnis Bugis dan etnis Kaili yang ada di pasar inpres Manonda Palu, bahwa pencegahan konflik jauh lebih baik ketimbang konflik yang sudah terjadi. Semua pihak turun tangan dalam mengelola konflik antar etnis ini sehingga konflik selanjutnya tidak akan terjadi lagi dan dapat dilihat pada point pembahasan.

#### **D. Penyelesaian Konflik (Resolusi Konflik)**

Konflik yang mengintari lingkungan etnis yang bertikai membutuhkan solusi (penyelesaian) untuk membatasi persoalan agar tidak berkembang lebih besar. Hal tersebut merupakan proses sosial melalui berbagai langkah penyelesaian konflik. Hendropuspito (dalam Nukma, 2005 : 27-28), menguraikan langkah-langkah penyelesaian konflik sbb :

1. Mediasi (mediation) yaitu cara untuk menyelesaikan persoalan atau pertikaian dengan menggunakan seorang mediator sebagai konsultatif. Seorang mediator tidak bisa mengambil keputusan kecuali hanya bagi mereka yang bersengketa.
2. Konsiliasi (perdamaian) yaitu suatu cara untuk mempertahankan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai sebagai pihak yang berkepentingan.
3. Arbitrasi (arbitration) artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim sebagai pengambil keputusan. Keputusan yang diberikan harus dan wajib ditaati oleh kedua pihak yang bersengketa.
4. Paksaan (Coercion) yaitu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologi. Paksaan biasanya dilakukan oleh pihak yang kuat.
5. Détente (mengendorkan) yaitu mengurangi hubungan tegang. Sistem ini menggunakan pendekatan untuk membicarakan langkah-langkah atau solusi mencari perdamaian sebelum ada yang dinyatakan kalah atau menang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yohanes dkk “Model Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pada Masyarakat Melayu dan Madura. Dalam temuan penelitiannya berupa :(1) pranata adat Melayu dan Madura yang berfungsi sebagai media resolusi konflik adalah yang berbentuk adat musyawarah; (2) pranata adat musyawarah hanya berfungsi menyelesaikan konflik yang berskala kecil, sedangkan konflik yang menimbulkan korban jiwa diserahkan penyelesaiannya melalui aparat hukum Negara (Polisi); (3) proses dan mekanisme adat musyawarah dilakukan oleh kepala desa dibantu para pengurus adat (pemangku adat) bersama-sama dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak yang berkonflik; (4) pranata adat musyawarah, dilandasi dan dijiwai oleh ajaran agama islam; (5) pranata adat musyawara berfungsi mencegah meluasnya konflik dan menyelesaikan konflik (menciptakan perdamaian); (6) masyarakat Kalimantan Barat (Melayu-Madura dan Non Melayu-Madura) dapat menerima penggunaan pranata adat musyawarah sebagai media resolusi konflik, kecuali jika konflik tersebut terjadi di wilayah etnik Dayak maka penyelesaiannya harus menggunakan hukum adat dayak.

Dari apa yang diuraikan di atas, penyelesaian konflik yang berbasis Pranata adat dalam masyarakat Melayu dan Madura diterima sebagai alat untuk menyatukan kedua belah pihak yang berkonflik. Kemudian dikaitkan dengan penyelesaian konflik antara etnis Bugis dan etnis Kaili yang terjadi di pasar inpres Manonda ini, melibatkan seluruh perangkat yaitu pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dari kedua pedagang, kepolisian dan tokoh

masyarakat yang dianggap berkompeten memberikan solusi dalam penyelesaian konflik antar etnis yang terjadi di kota Palu. Kemudian dari hasil musyawarah melahirkan kesepakatan yaitu dengan terbitnya surat perjanjian yang disepakati oleh kedua etnis tersebut guna menciptakan perdamaian.

#### **E. Kerangka Pikir.**

Fokus penelitian adalah model pengelolaan konflik etnis Bugis dan etnis Kaili di pasar inpres Manonda Palu, dimana kota Palu sebagai pusat perdagangan lebih dikuasai oleh etnis Bugis sementara penduduk asli yakni etnis Kaili hanya sebagai pedagang tradisional olehnya secara tidak langsung akan memunculkan potensi konflik di antara kedua etnis tersebut. Perebutan sumber daya di pasar inpres ini, kecemburuan sosial dan juga adanya stereotipe antara kedua etnis ini sumber daya sehingga konflik antara kedua etnis ini terjadi, dimana etnis Kaili merasa terpinggirkan dengan kehadiran etnis Bugis di Kota palu terutama dalam penguasaan dan di dominasinya pasar inpres manonda kecamatan Palu Barat ini sementara etnis Kaili merupakan penduduk asli dan tidak bisa berhasil seperti mereka.

Berdasarkan konsep awal tersebut, dapat dipahami proses awal kedatangan etnis Bugis di kota Palu dan bagaimana etnis Bugis dalam melakukan aktivitas ekonomi di pasar inpres Manonda tentunya telah membawa suatu perubahan pada tatanan ekonomi, sosial budaya, dan bahkan pendidikan. Termasuk pola hubungan dengan penduduk asli yakni etnis Kaili, dalam kaitanya

penelitian diarahkan untuk menelusuri model pengelolaan konflik yang terjadi di pasar inpres Manonda Palu kecamatan Palu Barat Sulawesi Tengah.

### Bagan Kerangka Pikir

